

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional merupakan suatu usaha yang paling pokok dalam proses perubahan, perkembangan dan kehidupan bangsa Indonesia. Di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia masih menghadapi berbagai masalah yang berkisar pada tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat kehidupan yang masih di bawah standar normal, pengangguran, kemiskinan dan lain-lain masalah yang merupakan beban yang harus kita pikul bersama.

Pembangunan nasional yang sedang giat-giat kita laksanakan sekarang ini tidak hanya ditujukan untuk pembangunan fisik dan ekonomi saja, tetapi juga pembangunan yang mencakup semua aspek kehidupan dan struktur masyarakat. Dengan kata lain, hakekat pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah; "pembangunan manusia seutuhnya". Pembangunan manusia seutuhnya mengandung arti bahwa pembangunan tidak hanya ditujukan semata-mata pembangunan fisik, tetapi juga harus mencakup pembangunan mental spritual.

Hal ini sejalan dengan cita-cita dan harapan dari kemerdekaan Republik Indonesia itu sendiri, yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur dan merata baik-

materil maupun spritual yang berdasarkan pncasila di-
dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia merdeka ,
berdaulat dan bersatu dalam suasana perikehidupan bangsa
yang tenteram, tertib dan aman sejahtera dalam lingku-
ngan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertip
dan damai.

Untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur,
dan merata, maka salah satu usaha yang benar-benar ha-
rus dilaksanakan oleh pengelola kekuasaan Republik Indo-
nesia dan masyarakat adalah; "kewajiban untuk mencerdas-
kan kehidupan bangsa". Hal ini terlihat jelas pada ali-
nea ke empat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar-1945,
yaitu dalam pasal 31 menyebutkan bahwa; "tiap warga ne-
gara berhak untuk mendapatkan pengajaran".

Kemajuan suatu bangsa diantaranya di tandai oleh
tingkat pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendi-
dikan nonformal. Adalah suatu gejala yang wajar di tanah
air kita sekarang ini bahwa permasalahan pendidikan me-
rupakan suatu masalah pokok yang mendapat perhatian yang
cukup besar, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Ka-
rena itu setiap warga negara diharapkan dapat tanggap
terhadap setiap kesempatan dan kegiatan yang berkaitan
dengan kepentingan, kecerdasan dan penghidupan bangsa.

Pendidikan merupakan sumber kemajuan suatu bangsa, maka dari itu usaha-usaha peningkatan di bidang pendidikan perlu dilakukan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Sehingga pendidikan ataupun keterampilan benar-benar dapat memberi arti dalam usaha peningkatan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Usaha peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat pedesaan merupakan suatu usaha yang sangat mendesak. Karena sebahagian besar rakyat Indonesia berdomisili di daerah pedesaan, dengan tingkat pengetahuan, keterampilan dan kesehatan yang masih rendah, terutama di kalangan kaum wanita.

Untuk mencepat pencapaian usaha peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat pedesaan, program yang dilaksanakan itu harus sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang digariskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yaitu: "pendidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah disesuaikan dengan perkembangan tuntutan pembangunan yang memerlukan berbagai jenis keterampilan dan keahlian disegala bidang serta tingkat mutunya sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi".

Melalui proses pendidikan akan dihasilkan manusia-manusia yang pandai, cakap dan berkepribadian, yang ten-

tunya diperlukan dalam proses pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam hubungan ini, pendidikan ditempatkan pada suatu kedudukan yang cukup strategis, yaitu pada proses pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, dan diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan-tantangan pembangunan.

Dengan demikian pendidikan merupakan suatu proses pewarisan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa Indonesia dibidang pendidikan, seperti yang dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yaitu :

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkeperibadian, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani, (TAP.MPR.RI. Nomor II/MPR/1988 : 77).

Pendidikan dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan berlangsung sepanjang hayat dan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Karena itu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian pendidikan nasional akan mampu mewujutkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pem-

bangunan bangsa. Tujuan pembangunan nasional yang dikemukakan di atas tentu saja tidak dapat dicapai hanya melalui pendidikan persekolahan (formal) saja. Mengingat keterbatasan daya gerak pendidikan formal yang sangat terbatas, maka keberadaan pendidikan luar sekolah di tengah-tengah masyarakat diharapkan dapat membantu dalam proses pencapaian tujuan dimaksud. Pendidikan luar sekolah yang meliputi keluarga, kelompok belajar, kursus dan satuan pendidikan sejenis lainnya memiliki fungsi untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia sebagai pelaku utama pembangunan dan berorientasi pada kemajuan masa depan. Serta untuk memenuhi kebutuhan praktis dan meneruskan warisan budaya, kemampuan-kemampuan dan cara-cara kerja serta teknologi masyarakat dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam hubungan ini, Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan luar sekolah bersama-sama dengan pendidikan di sekolah merupakan suatu usaha untuk menyiapkan masyarakat (peserta didik) agar berperan di masa yang akan datang. Dengan kata lain keberadaan pendidikan luar sekolah semakin terasa manfaatnya bagi pembangunan nasional, terutama dalam menciptakan manusia-manusia yang mempunyai pengetahuan, keterampilan

dan sikap pembaharuan, yang nantinya akan mampu berpartisipasi dalam pensukseskan program pembangunan. Program pendidikan luar sekolah akan dapat menghasilkan manusia-manusia dari tidak berkemampuan karena tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan menjadi manusia-manusia yang mempunyai kemampuan dan keahlian. Tanpa ada usaha untuk menciptakan manusia yang berkualitas, maka usaha pembangunan terutama di daerah pedesaan akan terhambat. Karena sumber daya manusia yang ada di pedesaan merupakan kekuatan yang perlu didayagunakan, terutama untuk membangun daerah pedesaan itu sendiri.

Sehubungan dengan gambaran di atas, Theodore Schulz dan W.Arther Lewis mengemukakan bahwa, "peningkatan sumber daya manusia mutlak diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan, karena faktor kemampuan manusia merupakan kekuatan dalam pembangunan", (Adam Curle, 1982 : 15). Mohammad Fakry Gaffar (1987 : 28) mengemukakan pula bahwa :

Posisi sumber daya manusia merupakan posisi sentral dalam pembangunan nasional menjelang tinggal landas, maka seharusnya perhatian dan daya serta usaha dipusatkan untuk membangun sumber daya manusia yang mempunyai kualitas yang dapat memenuhi kemajuan dan cita-cita yang mendukung terwujudnya fase tinggal landas yang amat penting itu.

Potensi manusia seutuhnya hendaknya dikembangkan secara wajar lewat proses pendidikan, agar supaya setiap

individu dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan yang lebih baik dan terhormat. Dengan demikian pembangunan di bidang pendidikan, khususnya pendidikan luar sekolah harus dapat berfungsi untuk meningkatkan dua hal, yaitu : (1) menyiapkan tenaga kerja pembangunan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, (2) ikut membina masyarakat yang terbuka, tertip dan dinamis, yang akan menjadi landasan bagi terujutnya masyarakat Indonesia yang kokoh.

Sehubungan dengan itu, pendidikan khususnya pendidikan luar sekolah harus dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, baik masyarakat kota maupun masyarakat pedesaan. Sehingga mereka mempunyai bekal pengetahuan dan keterampilan dalam meningkatkan kehidupannya. Berkeinginan dengan itu, W.P.Napitupulu (1988 : 100) mengemukakan bahwa agar perubahan tingkah laku masyarakat kearah yang diinginkan, maka perlu disampaikan : (1) pengetahuan atau informasi fungsional yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka peningkatan taraf hidup, (2) keterampilan yang dapat dijadikan bekal untuk mencari nafkah sehari-hari, sehingga seseorang itu sanggup berproduksi dan tidak menggantungkan diri pada orang lain, (3) sikap mental pembangunan yang membuatnya siap siaga untuk perubahan dan berusaha menca-

cari dan menemukan tata cara berbuat yang lebih efektif dan efisien.

Dalam kaitan inilah pendidikan luar sekolah dipandang sebagai salah satu alternatif yang paling tepat, terutama dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ada di desa. Pandangan ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa pendidikan luar sekolah berlangsung sepanjang hayat dan diselenggarakan dalam lingkungan masyarakat, terutama wanita-wanita pedesaan yang selama ini kurang berperan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional, terutama pembangunan pedesaan.

B. Masalah dan Perumusannya

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, jelaslah bahwa keberadaan pendidikan luar sekolah untuk masyarakat pedesaan, khususnya untuk kaum wanita patut mendapat dukungan semua pihak. Karena pendidikan dan pembinaan wanita pedesaan merupakan bahagian dari pembangunan nasional secara merata dan menyeluruh. Untuk itu strategi pengembangan pendidikan luar sekolah untuk wanita pedesaan itu sangat ideal bila dilakukan melalui program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), karena program PKK digerakkan dan dilaksanakan oleh kaum wanita itu sendiri.

Pelaksanaan pendidikan luar sekolah untuk masyarakat pedesaan, khususnya untuk kaum wanita perlu mendapat perhatian yang lebih besar dalam proses pembangunan nasional. Karena kenyataan menunjukkan bahwa kaum wanita pedesaan kurang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan yang seharusnya mereka punyai dan banyak dari mereka yang masih buta huruf latin dan angka serta rendahnya tingkat kesehatan.

Hampir disemua negara, terutama negara-negara berkembang dan masih terbelakang, kaum wanita kurang mendapat kesempatan bila dibandingkan dengan kaum pria. Kalau keadaan yang demikian dibiarkan berjalan terus, maka akan semakin kuatnya pandangan lama bahwa kaum wanita lebih rendah pendidikan dan keterampilan dibandingkan dengan kaum pria.

Pendidikan luar sekolah tidak hanya sangat membantu menghilangkan anggapan bahwa kaum wanita adalah lebih rendah, melainkan juga menghilangkan rendahnya status mereka yang memang masih berlaku sampai sekarang. Hal ini sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Jacqueline Chabaud (1984 : 5) yaitu ; "dewasa ini berjuta-juta kaum wanita (wanita pedesaan) hidup dalam keadaan terbelakang, kehilangan identitas sebagai wanita, karena itu pendidikan akan merupakan alat pembebasan baginya".

Status ketergantungan kaum wanita pada kaum pria pada masa lalu dan sikap mengabdikan yang tradisional itu masih berat menindas mental kaum wanita dimana-mana, terutama di daerah pedesaan. Kelemahan-kelemahan seperti itu merupakan hal yang membutuhkan perhatian yang sungguh-sungguh, agar peranan dan partisipasi kaum wanita dalam proses pembangunan nasional benar-benar dapat teru -
jut seperti halnya kaum pria.

Keterbelakangan dan kebodohan kaum wanita akan mengakibatkan pula kerugian dibidang pertanian, karena kaum wanita cukup memainkan peranan yang menentukan, seperti di daerah penelitian. Kalau mereka tidak menerima pendidikan dan keterampilan yang layak, bagaimana mungkin pertanian akan mengalami kemajuan. Demikian pula dalam bidang-bidang lainnya, seperti bidang kesehatan keluarga, kebersihan dan sebagainya. Sehubungan dengan itu tujuan dari upaya membina, memberikan pendidikan dan keterampilan kepada kaum wanita, terutama di pedesaan adalah untuk menciptakan dan menyiapkan mereka agar mampu dan dapat menaggulangi kewajiban-kewajibannya baik di rumah tangga, masyarakat maupun negara. Pengetahuan dan keterampilan yang disampaikan melalui program PKK dari angkatan satu keangkatan berikutnya membawa pengaruh yang cukup besar dan kuat, sehingga seringkali lebih tinggi tingkat

nilainya dari pada pendidikan apapun yang mungkin mereka terima dari luar sekolah.

Dari zaman dulu sampai sekarang, kaum wanita memegang peranan penting sebagai ibu rumah tangga yang meliputi segala macam pekerjaan berat dan ringan, seperti mengatur rumah tangga, memasak, mengasuh, mendidik anak dan sebagainya. Maka justru di zaman sekarang ini kaum wanita perlu dilindungi melalui berbagai kegiatan yang dapat membantu mereka dalam meningkatkan kemampuan, baik kemampuan fisik maupun kemampuan mental.

Mengingat betapa pentingnya kedudukan kaum wanita dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, maka nasib kaum wanita patut diberi perhatian yang lebih besar, terutama dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pembaharuan. Disamping usaha-usaha atau kegiatan melalui organisasi-organisasi guna perbaikan dalam kedudukan wanita, menanam benih persamaan hak dan kewajiban dalam lingkungan rumah tangga sendiri, antara lain dengan mendidik anak-anaknya. Sesuai dengan cita-cita pergerakan wanita itu sendiri, maka usaha mempraktekkan persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan wanita pada anak-anaknya sendiri menjadi tugas pokok dari kaum wanita.

Sebagai pengasuh dan pendidik yang utama untuk anak-anaknya, maka usaha peningkatan pengetahuan dan keterampilan kepada kaum wanita sangat besar manfaatnya baik untuk lingkungan keluarga maupun masyarakat. Nani Suwondo (1981 : 150) mengemukakan bahwa :

Pendidikan yang selus-luasnya bagi wanita menurut pembawaan dan kebutuhannya masing-masing penting sekali artinya. Disamping itu yang sangat penting adalah pendidikan "home economic", ilmu kesejahteraan keluarga, seperti hubungan inter dan antar keluarga, membimbing anak, makanan sehat, pakaian-perumahan, kesehatan, keuangan, tata laksana rumah tangga, keamanan lahir bathin, perencanaan sehat dan sebagainya.

Berdasarkan kutipan di atas, menunjukkan betapa besarnya peranan kaum wanita dalam mendidik anak-anak yaitu manusia-manusia pelaksana pembangunan masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan semboyan Islam yang mengatakan bahwa; "wanita itu tiang negara, apabila baik kaum wanita baiklah negara, dan apabila rusak wanita, maka rusaklah negara".

Namun demikian sebahagian dari kaum wanita tidak dapat melepaskan diri dari kehidupan dan keadaan yang tidak menguntungkan. Karena mereka kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan atau karena penderitaan telah mematahkan semangat berjuang. Disinilah tugas penting dari kaum wanita terpelajar, yaitu memperbaiki kedudukan kaum wanita, baik dalam lapangan pendidikan,

ekonomi, hukum, kesehatan dan lain sebagainya. Sehingga akan tercipta kader-kader wanita yang berkualitas yang sanggup berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan nasional, terutama dalam lingkungan rumah tangga dan masyarakat. Hal ini sesuai pula dengan peranan kaum wanita itu sendiri, yaitu : (1) sebagai warga negara dalam hubungan dengan hak-hak dalam bidang sipil dan politik, termasuk terhadap perlakuan wanita dalam partisipasi tenaga kerja, yang dapat disebut fungsi ekstern, (2) sebagai ibu rumah tangga dan isteri dalam hubungan rumah tangga, yang dapat disebut fungsi intern.

Oleh karena itu, maka secara langsung kaum wanita harus diajak untuk turut serta menyingsingkan lengan baju untuk bekerja dan berkarya demi kepentingan pembangunan bangsanya. Wanita akan bekerja dengan aktif apabila wanita itu sendiri memiliki pendidikan, pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan lingkup tugas dan kerjanya.

Sehubungan dengan uraian di atas, keberadaan program PKK dimana wanita sebagai penggerak utamanya merupakan suatu usaha dari pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan kaum wanita. Untuk meningkatkan kemampuan kaum wanita program PKK dirasakan sangat penting, karena materi dari program PKK mencakup semua aspek

kehidupan manusia, karena itu keberhasilan program PKK merupakan harapan dari kita semua. Namun demikian kenyataan menunjukkan bahwa hampir semua desa, khususnya di Daerah Istimewa Aceh sudah dan sedang dilaksanakan program PKK, tapi sangat sedikit yang berhasil dalam pelaksanaannya. Diantara sekian banyak desa di Daerah Istimewa Aceh yang melaksanakan program PKK hanya beberapa desa saja yang dinilai berhasil, itupun terbatas pada beberapa program atau kegiatan saja. Antara lain misalnya program kesehatan, koperasi, keterampilan, pangan dan sebagainya.

Kurang berhasilnya pelaksanaan program PKK khususnya di Daerah Istimewa Aceh karena berbagai faktor, baik faktor yang berasal dari dalam (intern) maupun faktor yang berasal dari luar (ekstern). Oleh karena itu dan untuk kesuksesan pelaksanaan program PKK untuk masa yang akan datang, maka memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya mutlak diperlukan. Tanpa memahami baik faktor pendukung maupun faktor penghambat, kemungkinan besar hasil yang akan dicapai tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana hasil pelaksanaan program PKK di daerah penelitian ?

2. Apakah tingkat pendidikan turut mendukung keberhasilan pelaksanaan program PKK ?.
3. Apakah tingkat status sosial ekonomi turut mendukung keberhasilan pelaksanaan program PKK ?.
4. Apakah sosial budaya (budaya gotong royong) turut mendukung keberhasilan pelaksanaan program PKK ?
5. Apakah tingkat ketaatan beragama turut mendukung keberhasilan pelaksanaan program PKK ?

Sehubungan dengan permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan atau menjawab permasalahan-permasalahan di atas. Secara rinci kelima variabel di atas dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Keberhasilan program PKK

Keberhasilan pelaksanaan program PKK (memahami dan menerapkan) adalah merupakan variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi variabel independen. Data yang ada menunjukkan bahwa dari sepuluh program pokok PKK hanya beberapa program saja yang berhasil dilaksanakan. Program-Program saja yang tergolong berhasil dilaksanakan antara lain kesehatan,

koperasi, keterampilan dan pangan. Sedangkan program-program lain seperti Penghayatan Pengamalan Pancasila, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, kelestarian lingkungan hidup, perencanaan sehat dan sebagainya belum menunjukkan hasil yang berarti.

Keberhasilan atau ketidak berhasilan program - program seperti yang telah dikemukakan di atas, ada kecenderungan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor pendidikan, sosial ekonomi, sosial budaya, dan faktor ketaatan beragama.

2. Tingkat pendidikan

Berhasilnya sesuatu program pembangunan adakalanya memberikan sumbangan yang positif terhadap perkembangan pendidikan. Sebaliknya dengan perkembangan pendidikan akan memberikan sumbangan yang positif pula terhadap keberhasilan program pembangunan. Terlepas dari hal di atas, dalam proses pembangunan pendidikan memegang peranan penting. Dengan pendidikan dapat mengembangkan pemilikan dan pemanfaatan teknologi dikalangan warga masyarakat, atau dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam penerapan teknologi dan ide-ide baru. Seorang psikologist memandang keluaran program pendidikan dalam wujud meningkatkan pengetahuan, sikap atau pri-

laku akan meningkatnya kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan dan bekerja sama dengan orang lain. Sehubungan dengan itu, Zainuddin Arief (1986 : 131) mengemukakan bahwa; "..... pendidikan tidak hanya mensosialisasikan individu kearah kopetensi baru, tetapi juga membuka cakrawala baru dalam berfikir, sehingga memungkinkan individu memilih alternatif-alternatif baru dalam melakukan peranannya".

Bagi masyarakat petani di negara-negara berkembang peranan pendidikan baik dalam bentuk penyuluhan, latihan dan pemberantasan buta huruf andilnya cukup besar dalam mewujudkan prilaku petani. Prilaku itu ikut berkontribusi terhadap peningkatan produksi pangan, disamping kemajuan tehnologi pertanian. Dalam hubungan ini, Zainuddin Arief (1986 : 117) selanjutnya mengemukakan bahwa; "..... pendidikan akan menjadi pusat upaya untuk mengobati kekurangan-kekurangan individu atau masyarakat yang menyebabkan menjadi penghambat pembangunan suatu bangsa.

Akan sulit memperoleh keberhasilan program PKK bila tingkat pendidikan pelaksana dan peserta didik rendah (buta huruf). Karena semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang semakin cepat menerima ide-ide perubahan. Semakin tinggi tingkat pendidikan

semakin meningkat status sosialnya, dan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin mudah dalam melaksanakan program pembangunan. Ini sesuai dengan pendapat Krech (1962 : 79) yang mengatakan bahwa; "semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin berkembang kognisinya, dan semakin sadar terhadap situasi sekitarnya".

3. Status Sosial Ekonomi

Setiap individu dalam hidup bermasyarakat selalu dibedakan dengan stratifikasi sosialnya. Individu yang hidup bermasyarakat selalu berkelompok-kelompok. Pengelompokan ini pada umumnya berkisar pada jenis kelamin, tingkatan umur, agama, pendidikan, dan ada pula didasarkan pada status sosial ekonomi. Dilihat dari status sosial ekonomi sendiri kadang-kadang didasarkan pada kelas ekonomi tinggi, kelas ekonomi menengah atau sedang dan kelas sosial ekonomi rendah.

Pembahagian masyarakat yang didasarkan pada kelas-kelas atau lapisan-lapisan atas, menengah dan rendah atau bawah semacam ini sering pula adanya tingkat perbedaan sosial atau adanya diferensiasi sosial. Setiap masyarakat yang mempunyai status sosial ekonomi tertentu turut menentukan pula pola tingkah laku para anggota

nya. Sering status sosial ekonomi seseorang turut menentukan aktif tidaknya dalam melaksanakan tugas atau kegiatan tertentu. Dengan kata lain peranan seseorang dalam kelompok kadang kala sangat ditentukan oleh status sosial ekonominya. Ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Keith Davis (1981 : 37), yaitu; "peranan seseorang dalam kelompok juga banyak ditentukan oleh status sosial ekonominya". Selanjutnya Krech (1962 : 31) mengemukakan bahwa status sosial ekonomi seseorang ditentukan oleh jenis pekerjaan, tingkat pendidikan dan pendapatan. Namun hasil studi yang dilakukan Warner, et al (1949) yang dikutip oleh Miller (1964 : 100) mengemukakan bahwa yang sangat menentukan status sosial ekonomi adalah; jenis pekerjaan, sumber pendapatan, pemilikan dan daerah tempat tinggal.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa status sosial ekonomi merupakan salah satu masalah yang turut menentukan berhasil tidaknya suatu program pembangunan. Dengan kata lain status sosial ekonomi mempunyai kecenderungan dalam menentukan keberhasilan program PKK khususnya di daerah penelitian.

4. Status Sosial Budaya

Kebudayaan merupakan konsep dasar dalam ilmu-ilmu

sosial, karena konsep tersebut dapat dijadikan titik tolak dari kajian semua aspek perilaku manusia. Kebudayaan adalah milik manusia, yaitu yang membedakannya dari makhluk lain di muka bumi ini. Hanya manusia atau masyarakatlah yang mempunyai dan memiliki kebudayaan. Kebudayaan dapat diartikan sebagai berikut : "keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya", (Koentjaraningrat, 1987 : 9).

Seorang antropolog, yaitu E.B. Tylor (1971) mengemukakan bahwa, kebudayaan adalah komplek, yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat atau kebiasaan dan lain kemampuan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat (Soerjono Soekanto, 1986 : 154). Selanjutnya Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi (1964 : 117) mengemukakan bahwa kebudayaan adalah sebagai berikut :

Kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (material culture) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan pada keperluan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa kebudayaan itu amat luas, karena mencakup hampir seluruh aktivitas manusia dalam proses kehidupannya. Karena begitu

luasnya arti kebudayaan, maka dalam penelitian ini hanya dibatasi pada lingkup yang kecil dari kebudayaan itu. Dengan alasan bahwa aspek yang kecil itu merupakan salah satu masalah yang mempunyai kecenderungan besar dalam mendukung keberhasilan program PKK, khususnya di daerah penelitian. Aspek kecil yang penulis maksudkan disini adalah "budaya gotong royong".

Masalah budaya gotong royong sebenarnya merupakan milik bangsa Indonesia yang dibawa sejak turun temurun, terutama di Daerah Istimewa Aceh. Namun akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, maka budaya gotong royong semakin ditinggalkan oleh masyarakat. Sebaliknya bagaimanapun majunya suatu negara budaya gotong royong tetap bermanfaat, terutama di lingkungan masyarakat pedesaan. Karena dengan gotong royong masalah yang tidak sanggup diselesaikan secara sendiri sendiri dapat diselesaikan secara bersama-sama.

5. Ketaatan Beragama

Untuk mencapai suatu kemajuan, umat Islam Indonesia harus benar-benar melaksanakan dasar-dasar Islam (iman, ilmu dan amal) yang merupakan dorongan bagi suatu kemajuan. Umat Islam harus menyadari bahwa Agama Islam bukan hanya mengatur hubungan antara manusia dengan

Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antara sesama manusia dan antara manusia dengan alam. Agama Islam diturunkan Allah S.W.T justru bertujuan untuk memperbaiki dan memajukan kehidupan umat manusia, baik pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Seseorang yang taat beragama Islam akan lebih mudah diajak untuk melaksanakan pembangunan dibandingkan dengan orang yang kurang taat beragama. Karena dalam Agama Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu dan bekerja keras. Untuk bekerja, Islam mewajibkan umatnya untuk mencari ilmu sejak dari ayunan sampai keliang lahat, dimana saja ilmu berada, sekalipun ditempat yang amat jauh sekali pun (Alhadis).

Sehubungan dengan uraian di atas, menunjukkan bahwa orang atau masyarakat yang taat beragama cenderung lebih aktif dalam proses pembangunan. Karena mereka menyadari bahwa menuntut ilmu dan berbuat baik merupakan suatu amaliah.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan keadaan pelaksanaan program PKK di daerah penelitian, dan untuk mengungkapkan faktor yang turut

mendukung atau memberi sumbangan terhadap keberhasilan responden dalam mengikuti program PKK.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi atau data empiris, yaitu :

1. Untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan program PKK di daerah penelitian.
2. Untuk mengetahui apakah benar tingkat pendidikan salah satu faktor yang turut mendukung keberhasilan program PKK.
3. Untuk mengetahui apakah benar tingkat status sosial ekonomi merupakan salah satu faktor yang turut mendukung keberhasilan program PKK.
4. Untuk mengetahui apakah benar status sosial budaya merupakan salah satu faktor yang turut mendukung keberhasilan program PKK.
5. Untuk mengetahui apakah benar tingkat ketaatan beragama merupakan salah satu faktor yang turut mendukung keberhasilan program PKK.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat :

- (a) Memberikan informasi tentang pengembangan pelaksanaan program PKK khususnya, dan program pendidikan luar sekolah umumnya.
- (b) Memperkaya serta mengembangkan konsep-konsep ataupun teori-teori yang telah ada dalam bidang PKK atau program pendidikan luar sekolah.
- (c) Memberikan sumbangan fikiran untuk mendukung atau memperkaya hasil penelitian orang lain tentang pendidikan luar sekolah pada kondisi yang berbeda.

2. Kegunaan secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat :

- (a) Dijadikan pedoman oleh organisasi PKK ataupun Pemerintah Daerah Istimewa Aceh dalam mensukseskan program PKK di daerah-daerah yang belum berhasil.
- (b) Dipergunakan sebagai bahan masukan yang sangat berharga bagi pengurus organisasi PKK dalam melaksanakan program PKK di daerah penelitian.

E. Alasan Pemilihan Masalah

Alasan-alasan yang mendasari pemilihan masalah

dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan salah satu program pembangunan yang lebih menghususkan diri pada pengembangan pendidikan luar sekolah bagi wanita. Dengan program PKK diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya kaum wanita yang selama ini masih mengalami kekurangan pengetahuan dan keterampilan, sehingga mereka mampu mengembangkan dirinya dan pada akhirnya mampu meningkatkan kehidupan diri dan keluarganya. Karena program ini menurut penilaian penulis begitu penting, dan termasuk salah satu program pendidikan luar sekolah, maka pengambilan masalah ini menjadi objek penelitian merupakan suatu usaha yang tepat.
2. Sejak dimulainya Pembangunan Lima Tahun (Pelita) Indonesia program PKK sudah mulai digalakkan di seluruh Indonesia. Dari tahun ke tahun sasaran dari program ini baik dilihat dari segi daerah, peserta didik bahkan pembiayaan semakin ditingkatkan. Maka tidak mengherankan pada akhir pelita IV hampir seluruh kota dan desa di Indonesia ada program PKK. Khususnya di Daerah Istimewa Aceh pada tahun terakhir Pelita III seluruh kota dan desa terpencil sekali pun

program PKK sudah mulai dilaksanakan. Namun kenyataan menunjukkan bahwa hanya sebahagian kecil desa saja yang tergolong berhasil dalam melaksanakannya, itupun pada kegiatan atau program tertentu saja. Dengan demikian penelitian tentang keadaan pelaksanaan program PKK dan faktor-faktor yang turut menunjang keberhasilan merupakan suatu usaha penting, terutama untuk pengembangan program PKK atau program pendidikan luar sekolah pada masa-masa yang akan datang.

F. Pengertian Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami permasalahan dan untuk tidak terjadi kesalah fahaman tentang beberapa istilah yang dikemukakan dalam topik penelitian ini, maka secara operasional dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor

Adalah suatu unsur yang memberikan sumbangan atau menunjang terhadap suatu keadaan tertentu. Faktor-faktor yang penulis maksudkan adalah; tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, tingkat sosial budaya (budaya gotong royong) dan ketaatan beraga Islam.

2. Keberhasilan

Yang dimaksud dengan keberhasilan disini adalah

responden-responden yang memahami atau mengerti tentang program-program PKK, dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan program PKK dalam kehidupannya sehari-hari.

3. Program PKK

Adalah salah satu gerakan pembangunan untuk membangun keluarga sebagai unit terkecil dalam suatu masyarakat, guna menumbuhkan, menghimpun, menggerakkan dan membina keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera. Program PKK yang dibahas dalam penelitian ini meliputi program kesehatan, koperasi, keterampilan dan program pangan.

4. Wanita Pedesaan

Yaitu wanita-wanita yang bertempat tinggal di daerah penelitian, dan menjadi anggota binaan program PKK, atau disebut dengan "peserta didik".

5. Tingkat Pendidikan

Adalah tingkat pendidikan formal yang dimiliki responden, yaitu pendidikan SD, SMP, SMA dan Pendidikan Tinggi.

6. Status Sosial Budaya

Adalah suatu kebiasaan responden dalam melaksa -

nakan sesuatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan secara gotong royong.

7. Status sosial ekonomi

Adalah tingkat pendapatan keluarga per-bulan, jenis mata pencaharian atau sumber pendapatan, tipe rumah, pemilikan alat perabotan rumah tangga dan alat transportasi yang dimiliki responden.

8. Ketaatan beragama Islam

Adalah kegiatan responden yang bersifat keagamaan yang sering dikerjakan responden seperti shalat sunat, shalat wajib, pengajian dan sebagainya, serta pendapat responden tentang program PKK ditinjau dari Agama Islam.

G. Pembatasan Penelitian

Pada dasarnya faktor-faktor yang turut memberikan sumbangan atau mendukung keberhasilan program PKK atau responden dalam mengikuti program PKK cukup banyak, baik faktor yang berasal dari luar (exstern) maupun faktor yang berasal dari dalam (intern). Namun dalam penelitian ini tidak semua faktor yang mempengaruhi diteliti.

Tidak diambilnya semua faktor yang turut mempengaruhi untuk diteliti karena disebabkan oleh berbagai keterbatasan, baik yang menyangkut dengan keterbatasan waktu, dana dan kemampuan. Oleh karena itu untuk tidak menimbulkan kesan yang tidak diinginkan, maka dirasa perlu memberikan pembatasan penelitian, yaitu terbatas pada faktor-faktor tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, sosial budaya (budaya gotong royong) dan ketaan beragama Islam. Faktor-faktor tersebut di atas adalah faktor-faktor yang turut memberikan sumbangan atau menunjang keberhasilan program PKK atau membantu responden dalam mengikuti program PKK (program kesehatan, koperasi, keterampilan dan program pangan).

Mengingat penelitian ini sifatnya studi deskriptif maka daerah penelitian hanya di batasi pada dua desa yang pada umumnya homogen, yaitu Desa Gelanggang Kulam, Kecamatan Jeumpa dan Desa Lapang Barat, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Aceh Utara.